

SIARAN PERS

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 KEPADA SEPULUH PEMERINTAH DAERAH

Pontianak, Rabu (30 Mei 2018) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Rabu 30 Mei 2018 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, kepada sepuluh entitas yang diserahkan oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat **Rita Amelia, S.E., M.M., Ak.**, bertempat di Ruang Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

LKPD merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan keyakinan apakah LKPD telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut, BPK menyampaikan 3 (tiga) buah buku laporan yang memuat: 1) laporan hasil pemeriksaan yang memuat pernyataan atau opini atas kewajaran laporan keuangan, 2) laporan hasil pemeriksaan terkait dengan pengendalian internal dan 3) laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dari hasil pemeriksaan yang BPK lakukan terhadap sepuluh entitas, terdapat delapan entitas yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dua entitas masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kedelapan entitas tersebut adalah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah. Sedangkan dua entitas lain opininya masih tetap masih WDP yaitu Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Sambas.

Pencapaian opini WTP tersebut, tidak berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Pengelolaan aset tetap dan persediaan di beberapa pemda yang belum memadai masih terjadi, walaupun nilainya masih di bawah batas nilai materialitas yang telah ditentukan.

Begitu pula dengan entitas yang mendapatkan opini WDP, permasalahan-permasalahan pokok yang menjadi pengecualian opini adalah Pencatatan Aset yang dilakukan secara global sehingga nilai beban dan akumulasi penyusutannya tidak diyakini nilainya, Aset Tetap yang berasal dari Dana BOS belum tercatat, Aset Tetap berupa peralatan mesin yang tidak diketahui keberadaannya serta kapitalisasi aset kegiatan rehabilitasi ke aset induknya yang belum dilakukan secara cermat.

Terkait kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan, masih dijumpai adanya kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa, belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran belanja langsung / berupa honor kegiatan dan insentif, serta pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial serta dana desa yang belum sesuai ketentuan.

BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (*stakeholders*), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205

Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com